BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dianalisa pada bab 4, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Strategi Humas dan Protokol

   Startegi Humas dan Protokol mulai dibentuk setelah adanya revisi Peraturan Bupati tentang kemitraan wartawan daerah dengan menggagas kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi sebagai strategi yang digunakan untuk meningkatkan citra Humas dan Protokol dikalangan masyarkat Kabupaten Indramayu sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan program kerja Humas dan Protokol yang meliputi penyiapan kegiatan resmi Pemerintah, pembuatan dokumentasi foto dan video, penyusunan *press release*, pengelolaan *website www.humasindramayu.com,* penyusunan kliping berita, rapat koordinasi kehumasan, penyusunan *advetorial*, dan pengadaan surat kabar di lingkungan SETDA, desa dan kecamatan se-Kabupaten Indramayu.

2. Pencarian Fakta

   Strategi untuk meningkatkan citra dikalangan masyarakat Kabupaten Indramayu terbentuk setelah adanya Bagian Humas dan Protokol tahun 2008, dan revisi Peraturan Bupati Nomor 9B tahun 2009 tentang kemitraan dengan wartawan daerah. Kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi yang dilaksanakan oleh Humas dan Protokol Pemerintah Kabupaten Indramayu dapat berjalan dengan baik karena akses informasi semakin mudah sampai kepada masyarakat melalui berbagai media, baik media cetak mau pun media elektronik. Sehingga berdampak kepada pencitraan yang semakin baik dan meningkat.

3. Perencanaan

   Melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi ini, Humas sangat berperan aktif dalam melaksanakan program kerjanya, salah satu program kerja yang menjadi unggulan Pemerintah Daerah yaitu pendidikan *metode tamyiz* yaitu pemahaman isi kandungan Al Quran yang pesertanya akan dipesantrenkan oleh Pemerintah dengan biaya keseluruhan ditanggung Pemerintah. Tujuan program kerja Pemerintah tersebut agar citra Indramayu semakin positif sesuai dengan visinya yang religius, maju, mandiri dan sejahtera.

4. Kegiatan Berkomunikasi

   Peran serta wartawan dalam proses meningkatkan citra Indramayu tidak pernah diarahkan oleh Pemerintah dalam penulisan berita. Pemerintah memberi kebebasan kepada para wartawan agar menulis sesuai kode etik jurnalistik. Kemudian wartawan media cetak pun dalam mengelola hasil pemberitaannya menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah diserap oleh semua kalangan, sedangkan pada media elektronik yaitu radio cara penyampainnya lebih santai, bisa dengan gaya bercanda melalui *talk show* dan membuka layanan telepon interaktif.

5. Pengawasan atau evaluasi

   Dalam melaksanakan tugasnya Humas dan Protokol ini tidak hanya bekerja sendiri akan tetapi ada kerja sama dengan wartawan sehingga setiap ada kegiatan terekspos dengan baik, kemudian menjalin hubungan baik dengan masyarakat yang mendukung setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah. Pada kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Humas dan Protokol melakukan pengawasan melalui *facebook, website* dan kliping berita.

5.2 Saran

Dalam sebuah penelitian, seorang peneliti harus mampu memberikan sesuatu yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Instansi, atau Lembaga yang berkaitan dengan penelitian ini. Ada pun saran-saran yang dapat peneliti berikan setelah penelitian ini dilaksanakan adalah :

1. Peran serta Humas dan Protokol Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu masih belum bisa langsung menyentuh masyaraakat di kalangan bawah. Oleh karena itu Humas seharusnya bekerja sama dengan lintas struktural disemua Kecamatan dan Desa Se-Kabupaten Indramayu untuk melakukan program kerja yang merata. Misalnya Humas membuat Bagian Humas dan Protokol di Kecamatan dan tingkat UPTD Pendidikan, Kesehatan dan semua Unit Pelaksana Kecamatan.
2. Humas dan Protokol harus dapat memberikan informasi yang akurat, bisa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat tentang persoalan-persoalan yang terjadi di Kabupaten Indramayu, bukan hanya menyampaikan yang positif, sisi negatif pun harus disampaikan agar ada sebuah perubahan pada Pemerintahan dengan terjun langsung pada setiap peliputan kegiatan Pemerintah.
3. Meskipun sudah ada wartawan sebagai fungsi media, Humas dan protokol tetap harus berperan aktif dalam peliputan pemberitaan, karena terkadang wartawan mempunyai kepentingan bisnis sehingga dapat memihak kepada siapa saja. Pemerintah yang pro rakyat adalah

Pemerintah yang mempunyai sistem berbasis keterpihakan kepada rakyat.

4. Humas dan Protokol paling banyak bertanggung jawab terhadap baik buruknya pencitraan Pemerintah, maka pembenahan *person* dan sistem kerja di Humas dan Protokol juga penting. Akan lebih baik *person* di dalamnya terdiri dari ahli komunikasi atau setidaknya orang-orang yang memiliki kecerdasan dalam berkomunikasi artinya seorang Humas harus bisa menjadi juru bicara yang baik bagi Pemerintah Daerah dan juga masyarakat sebagai jembatan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat. Tidak hanya *person*-nya yang dibenahi, tetapi dari segi kualitas dan kuantitas juga harus menunjang. Sehingga Humas dapat mengkombinasikan antara kepentingan Pemerintah Daerah dan masyarakat.